



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN
SUB UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR II BIDANG KEUANGAN DAN SUMBER DAYA**
3. NHK : **658106**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 20.950.000.000**

1. Tanah Seluas 526 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 13.150.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
3. Bangunan Seluas 0 m2 di BANDUNG, LAINNYA Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 2.719.667.500**

1. MOBIL, DATSUN GO PANCA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 69.350.000
2. MOTOR, PIAGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 22.950.000
3. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.367.500
4. MOBIL, BMW BMW 318 I Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000
5. MOTOR, HARLEY FATBOY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000
6. MOBIL, HONDA VELLFIRE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 965.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 981.241.718****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 8.665.519.403**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	33.316.428.621
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	33.316.428.621

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 September 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.